

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ZULHANDRI CHALID

98679 / 2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITINGGI**

NAMA : ZULHANDRI CHALID
BP/NIM : 2009/98679
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Padang, Februari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, ak
NIP.19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19840113 200912 2 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

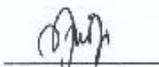
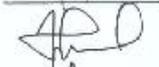
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Zulhandri Chalid
BP/NIM : 2009/98679
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
4. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M, Ak	

ABSTRAK

Zulhandri cholid (2009/98679) : “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”

Pembimbing 1. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

2. Mayar Afriyenti SE, M.Sc

Rendahnya kualitas laporan keuangan di Indonesia ini menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemahaman SAP dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Kota Bukittinggi, dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana masalah dalam pemerintahan Kota Bukittinggi yang harus dibenahi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pegawai atau staf akuntansi/keuangan di 29 SKPD Kota Bukittinggi. Pemilihan sampel menggunakan metode *total sampling* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuisioner. Sebelum digunakan untuk memperoleh data, kuisioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pemahaman SAP dan tidak terdapat pengaruh pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan, dengan nilai t_{hitung} adalah 1,983 dimana t_{tabel} adalah senilai 4,336 dengan nilai signifikansi adalah 0,000. Karena angka $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H1 **diterima** dan pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan tidak terdapat pengaruh dengan nilai t_{hitung} adalah 1,983 dimana t_{tabel} adalah senilai 1,353 dengan nilai signifikansi adalah 0,175. karena angka $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H2 **ditolak**.

Dapat di lihat terdapat pengaruh yang signifikan pada pemahaman SAP dan tidak terdapat pengaruh pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi staf keuangan dan pemerintahan Kota Bukittinggi untuk memperhatikan kembali faktor pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan jaringan internet wajib dilakukan oleh pemerintahan Kota Bukittinggi untuk mencapai tujuan tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak** selaku Pembimbing I dan Ibu **Mayar Afriyenti, SE, M.Sc** selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	8
1.Laporan Keuangan.....	8
a. Pengertian , Dasar Hukum, dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan	8
b. Kualitas Laporan Keuangan.....	11
c. Peranan dan tujuan laporan keuangan.....	14
d. Komponen laporan keuangan daerah	16
2.Standar Akuntansi Pemerintah	18
a. Pengertian SAP	18
b. Komponen Pernyataan SAP	20
3.Teknologi Informasi.....	25
a. Pengetian, Kegunaan Teknologi Informasi.....	25
b. Pemanfaatan Teknologi informasi	26
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Hubungan Antar Variabel	31
D. Kerangka Konseptual	33

E. Hipotesis	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Populasi Dan Sampel	35
C. Jenis Dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Variabel Penelitian	38
F. Instrumen Penelitian	38
G. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas	39
H. Teknik Analisis Data	40
I. Definisi Operasional	44
BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B. Demografi Responden	47
C. Deskripsi Variabel Penelitian	49
D. Statistik Deskriptif	55
E. Uji Validitas Dan Reabilitas	56
F. Uji Asumsi Klasik	58
G. Analisis Data	61
H. Pembahasan.....	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan	70
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi	36
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	39
3. Penyebaran Kuisisioner Tiap SKPD	46
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	46
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	49
8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	50
9. Distribusi Frekuensi Skor Variabel pemahaman SAP	52
10. Distribusi Frekuensi skor Variabel Pemanfaatan teknologi Informasi	54
11. Descriptive Statistic	56
12. Nilai Corrected Item Total Correlation Terkecil	57
13. Nilai Cronbach's Alpha	57
14. Uji Normalitas	58
15. Uji Multikolinearitas	59
16. Uji Heteroskedastisitas	60
17. Koefisien Determinasi (R^2)	61
18. Koefisien Regresi Berganda	62
19. Uji F Statistik	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	72
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	76
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	79
4. Tabulasi Data Penelitian.....	83
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	96
6. Uji Asumsi Klasik	99
7. Uji F dan Uji t	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah maka secara langsung pemerintahan daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara lebih luas nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik

Salah satu upaya konkrit dari pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dimana laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan, laporan keuangan yang berkualitas itu adalah laporan yang memberikan informasi yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami tentang, posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi (Junita, 2009).

Cara untuk melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2011 Kota Bukittinggi, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti tidak ada peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2010. Pada tahun 2012 opini audit LKPD kota Bukittinggi tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2013 juga masih Wajar Dengan Pengecualian (koranpadang.com.2013).

Kualitas laporan keuangan tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya pemahaman SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Menurut Nasrudin (2008), sumber daya

manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas.

Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Perubahan ini menjadi sebuah tantangan baru bagi pembuat laporan keuangan. Dalam melakukan perubahan tersebut pemerintah tidak langsung

merubah basis kas menjadi basis akrual, KSAP merancang Basis Kas Menuju Akrual sebagai pijakan awal transisi basis keuangan ini yang tercantum pada Lampiran 2 SAP. Namun hingga sekarang implementasinya baru sampai menggunakan Basis Kas. Sehubungan dengan perubahan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan perubahan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP yang baru agar hasil dari laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan.

Fenomena lain dari kurangnya pemahaman SAP yang mengakibatkan tidak berkualitasnya laporan keuangan pada daerah lain dapat dilihat dari hasil audit BPK pada pemerintahan kota Manado dimana yang mendapatkan opini (WDP) pada tahun 2013, yaitu terdapat beberapa kesalahan seperti pengadaan barang untuk diserahkan masyarakat dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal, pengungkapan atas kerusakan/kehilangan dokumen pertanggung jawaban belanja dan kerugian akibat banjir di kota Manado tidak memadai dan terdapat bukti pertanggungjawaban belanja langsung yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, investasi permanen Pemerintah Kota Manado pada PDAM tidak disajikan secara riil dan pengungkapannya tidak memadai, pencatatan dan pelaporan aset lain-lain tidak memadai (berita manado.com, 2014) dan masih banyak poin lainnya yang secara tidak langsung mencerminkan kekurangan pemahaman akan standar standar yang harus dipenuhi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu juga diperhatikan faktor pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perangkat kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Teknologi

informasi tidak dapat diabaikan karena perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan, dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Meskipun selama dua dekade pemerintah telah mengembangkan *E-Government*, peringkat Indonesia secara global masih jauh tertinggal bahkan dengan negara tetangga sekalipun seperti Singapore, Malaysia dan Thailand. Dan perkembangan ekonomi negara tetangga jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. salah satu isu utama dari persoalan ini ialah tidak adanya sistem teknologi informasi yang merata di setiap daerah, kesenjangan masih cukup besar. Ada banyak desa atau kabupaten dan kota yang penyelenggaraan *e-government* sangat baik, tapi survei yang dilakukan PBB melihat secara keseluruhan dan wilayah Indonesia masih banyak yang belum menerapkan prinsip *e-goverment* sepenuhnya (dailysocial.net.2014). Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak merata mengakibatkan ketertinggalan kita di segi pemerintahan dan ekonomi.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistim informasi akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi (Afrianti.2011).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai Suwardjono (2005). Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengaruh Pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Bukittinggi?
2. Seauhmana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi ?
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti, hasil-hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal Pemahaman SAP dan Teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagi pemerintah kota Bukittinggi, memberikan masukan kepada Pemerintahan kota Bukittinggi tentang seberapa besar Pengaruh Pemahaman SAP dan Teknologi informasi terhadap kualitas Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
3. Bagi pembaca, untuk dijadikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian bagi mahasiswa lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian , Dasar Hukum, dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam suatu laporan keuangan Kerangka Konseptual SAP (2010 : 7). Berikut ini beberapa definisi mengenai laporan keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1. Menurut Munawir (2006 : 2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan atau aktivitas perusahaan tersebut”
2. Menurut Sawir (2009 : 2), “Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan”.
3. Menurut Warren et al (2005 : 24), “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang dibuat setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan yang menghasilkan informasi bagi pemakainya”.

Sedangkan dalam Lampiran II SAP (2010 : 12) “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang undangan”.

Dalam Kerangka Konseptual SAP, pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang di bidang keuangan negara;
3. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Dalam Kerangka Konseptual SAP juga dijelaskan mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan (Kerangka Asumsi dasar tersebut, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)).

a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara.

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010 :15) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan

keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam peng-ambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi meng-gambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat di-harapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Infor-masi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

c. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Peranan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam lampiran 2 Kerangka Konseptual SAP (2010 : 12), yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

4. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Selain peranan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat juga tujuan laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 Kerangka Konseptual SAP (2010 : 13), yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

d. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Komponen-komponen pokok yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan sebagaimana yang terdapat pada lampiran II.01 SAP (2010 : 13), yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

a. Pengertian SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah jika menurut peraturan perundang undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegunaan dari SAP sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. Lingkungan operasional organisasi berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
- b. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut
 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - c. Adanya pengaruh proses politik
 - d. Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah
 2. Ciri keuangan yang penting bagi pengendalian
 - a. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target target fiskal, dan sebagai alat pengendalian
 - b. investasi dalam asset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 - c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarmintam, 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa

orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Namun Roesyanto (2007 : 3) menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat dan menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sehubungan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, pemahaman terhadap SAP penting agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan”.

b. Komponen Pernyataan SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual memuat 12 lampiran SAP (2010), yaitu:

1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan

Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar
- c. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- d. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan

2. Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yg ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan.

4. Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode

akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Akuntansi persediaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

7. Akuntansi investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

8. Akuntansi aset tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

9. Akuntansi konstruksi dan pengerjaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk:

1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan
2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca
3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi

10. Akuntansi kewajiban

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

11. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

12. Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk

tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Teknologi Informasi

a. Pengertian, Kegunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2005). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada era teknologi informasi saat ini sangat bergantung pada teknologi dan sudah tidak relevan lagi jika Sistem Informasi Akuntansi masih menggunakan sistem manual pada pemerintahan, suatu sistem informasi dapat dikatakan pula suatu aplikasi sistem komputer utama yang pertama untuk mengolah data akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki empat tugas dasar sebagai pengumpul data, manipulasi data, penyimpanan data dan penyimpanan dokumen.

Menurut ariesta (2008) teknologi informasi yang baik pada pemerintahan saat ini adalah, disaat sumber daya manusia yang berkompentensi terintegrasi

dengan hardware dan software dengan jumlah yang memadai, sistem dengan jaringan informasi komunikasi yang terintegrasi dengan baik, pemeliharaan yang terjadwal, perbaikan atau pembaruan hardware dan software yang usang atau rusak secara teratur.

Kegunaan dari pemanfaatan teknologi informasi ini adalah (Wilkinson *et al.*, 2005)

1. pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2. keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
3. kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5. tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6. pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak,
7. produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Wilkinson *et al.*, 2005).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2008).

Komponen-komponen dasar dari sistem pengolahan data, pemrosesan transaksi mencakup masukan pemrosesan penyimpanan dan keluaran. Komponen atau elemen ini merupakan bagian dari sistem manual atau komputerisasi adalah sebagai berikut :

1. Masukan

Dokumen-dokumen sumber, seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian dan kartu jam kerja karyawan, merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem Pemrosesan transaksi.

Tujuan adalah:

- a. Menangkap data
- b. Membantu proses pengkomunikasian data dan pengotorisasian operasi departemen
- c. Menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil

- d. Menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang, jika dokumen dipelihara

2. Pemrosesan

Pemrosesan meliputi penggunaan jurnal dan register untuk menyediakan catatan masukan yang permanen dan kronologis. Ayat ini dibuat baik dengan tangan dalam sistem manual sederhana (penjumlahan) atau melalui pemasukan data oleh operator dengan menggunakan terminal dalam sistem yang terkomputerisasi. Sistem pemrosesan transaksi pada perusahaan menggunakan sistem komputerisasi, di manasetiap transaksi akan diolah ke dalam laporan keuangan melalui software komputer.

3. Penyimpanan

Buku besar dan berkas-berkas menyediakan penyimpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi, Seluruh transaksiakuntansi harus direfleksikan dalam buku besar. Ayat debit-kredit adalah masukan bagi setiap transaksi. Buku besar umum yang dihasilkan berbentuk gabungan, pita magnetik di simpan dalam komputer.Data yang tersimpan di suatu file dapat diolah dengan dua cara:

- a. Pengolahan tumpuk (Batch processing), yaitu cara memproses data di mana dokumen-dokumen bukti transaksi yang terjadi di tumpukkan sampai saat atau jumlah tertentu, untuk kemudian diproses bersama-sama pada akhir kerja
- b. Pengolahan online (Online processing) yaitu cara memproses data di mana transaksi yang terjadi langsung di masukkan ke komputer untuk

diproses, File yang di gunakan untuk menyimpan satu kesatuan data yang sejenis. File yang digunakan dalam pengolahan data menjadi informasi terdiri dari berbagai jenis. Jenis-jenis file tersebut adalah :

- a. File induk
- b. File transaksi
- c. File laporan
- d. File historis
- e. File cadangan

4. Keluaran

Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang di hasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari departemen accounting adalah laporan keuangan. Laporan keuangan mengikhtisarkan hasil hasil pemrosesan transaksi dan menyajikan hasil-hasil tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan dan berdasarkan ketentuan dari manajemen perusahaan.

B. Penelitian terdahulu

Sujana (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah”. Variabel independen yang digunakan pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi variabel Dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman SAP mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten jembrana dan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten jembrana.

Junita (2008) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar”. Variabel independen yang digunakan Pemahaman SAP, Pelatihan, serta pendidikan dan pelatihan, variabel dependen kualitas laporan keuangan SKPD kota pematangsiantar. Hasil penelitian Junita menyimpulkan pemahaman SAP memiliki hubungan signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Kota Pematangsiantar.

Irvan (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh pemahaman SAP dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Penelitian dari ini menghasilkan pemahaman SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ariessta (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan pemerintah. Hasil penelitian Arriesta menyimpulkan

pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pemahaman SAP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Menurut Tanjung (2008) Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh agustiawan (2010) menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian yang dilakukan oleh junita (208) tentang Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, menyatakan pemahaman SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan adanya pemahaman SAP dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini pada prinsipnya seorang penyusun laporan keuangan harus mampu dalam mengimplementasikan standar standar akuntansi pemerintah tersebut untuk

menghasilkan laporan keuangan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa dengan adanya pemahaman akan SAP dalam penyusunan laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan akan semakin baik.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

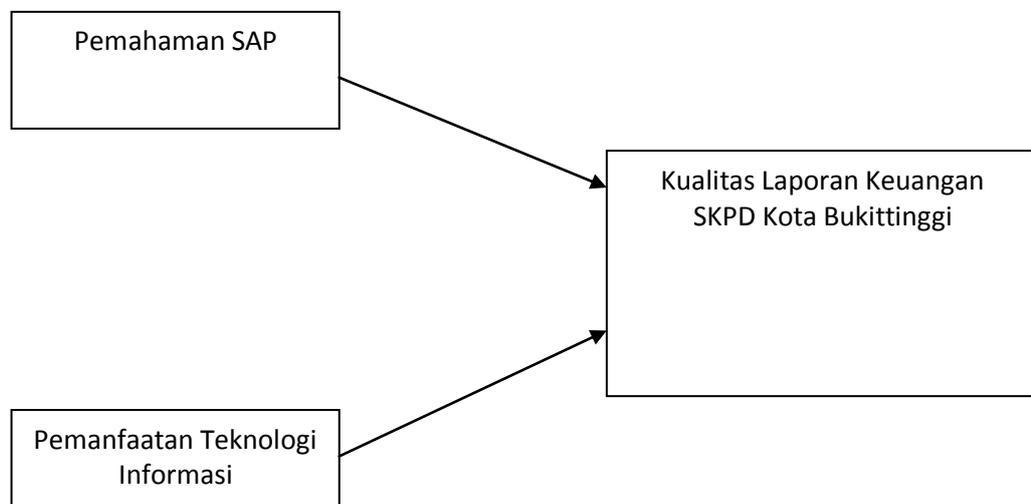
Penelitian indriasari (2008) tentang pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan pengaruh banyak baik dari sisi kualitas hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing*.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi

informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

D. Kerangka konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, dan tinjauan penelitian relevan, hubungan antar variabel, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh pemahaman SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap
Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi

E. Hipotesis

Berdasarkan bahasan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi” adalah :

- H1 : Pemahaman SAP berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan.
- H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas laporan keuangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi “ adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman SAP berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebagian dari responden mengisi kuisioner dengan tergesa gesa pada saat hari penjemputan yang telah dijanjikan sehingga beberapa hasil dari jawaban mungkin tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 24,7%. Sedangkan 75,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi staf akuntansi disarankan meyimpan ganda dari data data penting menggunakan media yang berbeda, dapat dalam penyimpanan hardware eksternal atau peyimpanan virtual sebagai wujud dari pengendalian.
2. Bagi Pemerintahan Kota Bukittinggi disarankan menyediakan jaringan internet yang lebih baik dan merata pada setiap SKPD Kota Bukittinggi.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.